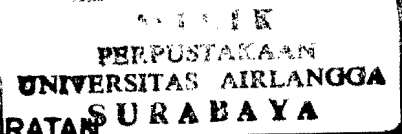


26
C 48/03
Nur
a

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
STUDI KASUS KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



Diajukan Oleh

**HEKSA CANDRA NURIS
No. Pokok : 049815981**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH:
Studi Kasus Kabupaten Situbondo**

DIAJUKAN OLEH :

HEKSA CANDRA NURIS

No. Pokok : 049815981

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs.Ec. BAMBANG SOENARNO

TANGGAL.....01-09-'03

KETUA PROGRAM STUDI,

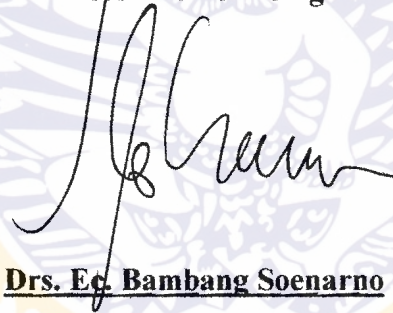

Dra.Ec.Hj. SRI KUSRENI, Msi

TANGGAL.....01-09-'03

Surabaya, *28 JULI 2003*

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. Ec. Bambang Soenarno

ABSTRAK

Tujuan Otonomi Daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah (Sidik, 2002). Di sisi lain, konsekuensi dari diterapkannya Otonomi Daerah adalah perubahan sistem administrasi yang berlaku. Daerah dituntut lebih otonom baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui berapa besar kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut.

Upaya nyata didalam mengukur tingkat kemandirian Kabupaten Situbondo sebagai subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah, dan dibandingkan juga dengan realisasi pengeluaran rutin, serta proporsi PAD terhadap besarnya Sumbangan dan Bantuan dari Pusat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Situbondo yang diukur melalui perbandingan PAD terhadap total pendapatan, pengeluaran rutin dan Sumbangan/Bantuan Pusat, adalah masih sangat rendah.

Sedangkan konsekuensi lain dari pelaksanaan otonomi daerah bagi Kabupaten Situbondo adalah perubahan komposisi sumber-sumber penerimaan yang cukup besar menyangkut struktur dan besarnya penerimaan daerah itu sendiri, berimplikasi kepada upaya peningkatan perencanaan dan pengawasan anggaran Kabupaten Situbondo dimasa mendatang agar lebih efektif dan efisien.